PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (SURVEI PADA DINAS SKPD PEMERINTAH KOTA BANDUNG)

ASTRI KUSWANDARI

Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia, JL. Dipati Ukur 112
Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia
astri9363@gmail.com

ABSTRACT

Internal control and local finance management is very important to improve the performance of local government. Local government performance is an overview of the level of achievement of the implementation of an activity, program, wisdom in realizing the goals, objectives, mission, and vision of the organization as stated in the formulation of an organization's strategic scheme.

This study aims to determine the effect of internal control and financial management on the performance of local government areas in government offices in the city of Bandung. Respondents of this study were 17 Head of Dinas SKPD Bandung City Government.

The research method used is descriptive verification. Data collection was conducted by surveying the distribution of questionnaires to the respondents. This study using a multiple linear regression analysis. Statistical tests using SPSS 20 for windows.

Results of this research is that the internal control and financial management areas each have a significant effect on the performance of local government. Performance of local governments can be created properly when internal control and financial management areas performing well.

***Keywords**: Internal Control; Local Finance Management; Local Government Performance.*

I. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi Negara secara menyeluruh (LAN, 2000). Salah satu cara yang di tempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan Negara/daerah (Abdul Rohman, 2009).

Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari kesalahan melainkan mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal (Effendi, 2005:4).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntansi adalah salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah, dan terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi menjadi kedala dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga mereka tidak peduli atau mungkin tidak mengerti permasalahan sesungguhnya. Penyataan ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing unit satuan kerja perlu dicermati guna menyelesaikan problem akuntansi dan penyajian informasi yang memadai (Askam Tuansikal, 2008:67).

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LK pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan lainnya termasuk BUMN.

Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas LK berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas tinggi.

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut IHP (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan) tahun 2013 tentang hasil pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK (badan pemeriksaan keuangan) pada Pemerintah Kota Bandung terdapat sebanyak 11 kasus yang menunjukan kelemahan sistem pengawasan intern yang diakibatkan karena, satuan pengawasan intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal. SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai. Ini mengakibatkan terjadi kelemahan dalam sistem pengawasan akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari 11 kasus yang terjadi karena pengelolaan keuangan daerah yang belum baik, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Faktor utama yang melatarbelakangi kelemahan unsur tersebut adalah sumber daya manusia itu sendiri, dalam hal ini pengawasan intern pada organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan keberadaannya guna membenahi dan meminimalisir kasus serupa.

Selain itu terdapat juga kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp 4.599.640.000 dengan kasus sebanyak 14 kasus, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti rekanan pengadaan barang dan jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangann volume pekerjaan dan barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain sebagainya.

Dan terdapat juga kekurangan penerimaan dengan nilai sebesar Rp 316.090.000 dengan jumlah kasus sebanyak 6 kasus, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penerimaan daerah atau denda keterlambataan pekerjaan belum diterima atau disetor ke kas daerah, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak.

Dan pada sistem administrasi sebanyak 7 kasus, yang terjadi oleh beberapa faktor yaitu pertanggungjawaban tidak akuntabel, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, dan lain sebagainya.

Dan terdapat juga kasus ketidakhematan dengan nilai Rp 695.530.000 dengan 2 jumlah kasus, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengadaan barang dan jasa melebihi

kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang digunakan tidak sesuai standar, terdapat pemborosan keuangan daerah atau kelemahan harga, penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya.

Dan didapati juga ketidakefektifan dengan nilai Rp 6.827.900.000 dengan jumlah kasus 1 yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pemanfaatan barang dan jasa tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan pelaksanaan kegiatan terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, dan target penerimaan tidak tercapai, barang yang dibeli tidak dimanfaatkan, pemanfaatan barang dan jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal.

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa belum terlaksananya dan terakomodirnya kinerja pemerintah daerah karena masih adanya kendala dalam pelaksanaan rencana kerja sehingga kinerja pemerintah daerah belum mencapai target dan tujuan yang telah direncanakan.

Oleh karena itu dilakukannya pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah untuk menunjukan pencapaian hasil yang dicapai. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi (Wawan Sukmana, 2009).

II. Kajian Pustaka dan Hipotesis

Menurut Baswir (1995) dalam Ihyaul Ulum (2009:129) pengawasan adalah: “Suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.”

*M*enurut Arifin Sabeni dan Imam Gozali (1997) dalam Wawan dan Lia (2009) pengawasan intern adalah: “Suatu alat pengawasan dari pimpinan organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan.“

Pengertian pengendalian intern menurut *Commite Of sponsoring Oganization (COSO)* yang dikutip oleh Boyntonn (2001:325) adalah sebagai berikut : *“Intern control is a process, effected by entity’s board of directors, Managements, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in following categories : 1). Reliability of financing reporting; 2). Compliance of with applicable laws and regulations; 3). Effectiveness and efficiency of operations.”*

Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission (COSO) memperkenalkan adanya lima komponen pengendalian intern yang meliputi Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Resiko (*Risk Assesment*), Aktivitas Pengendalian (Control Procedure), Pemantauan (*Monitoring*), serta Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*).

Menurut Arens et al (2003:270) adalah *“A system of intern control consist of policies and procedures designed to provide management with reasonable assurance that the company achieves its objective and goals”.*

*M*enurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengawasan intern adalah: “Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.”

Definisi keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

"Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut."

Menurut Abdul Halim (2007:137) pengelolaan keuangan daerah adalah: "Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah".

Menurut Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah."

Menurut Chabib Soleh dan Suripto (2011:3) Pengertian Kinerja adalah: "Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi". Menurut Chabib Soleh dan Rohcmansjah Heru (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi akuntabilitas, *value for money*, Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik, transparandi, dan pengendalian.

Menurut Abdul Rohman (2007) kinerja pemerintah daerah adalah : "Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema stategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu".

Menurut Wawan dan Lia (2009) dalam jurnalnya menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah adalah: "Bagaimana atau sejauh mana Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan-urusannya tersebut".

Menurut Ningsih,2002 dalam Ihyaul Ulum (2009:19) kinerja bisa berfokus pada input, misalnya uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politis atau birokrasi Kinerja bisa juga fokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome, misalnya: kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku, atau standar proses yang telah ditetapkan.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Rohman (2009) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan mencapai kinerja yang lebih baik. Fungsi pengawasan intern memonitor apakah perilaku sudah berorientasi pada pencapaian kinerja yang baik, dan melakukan koreksi atau perilaku dan hasil yang menyimpang dari kinerja yang diinginkan.

Sedangkan menurut Wawan dan Lia (2009) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa pengawasan intern dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan intern yang dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik kinerja Pemerintah daerah yang dicapai.

Pengawasan intern dimaksudkan untuk membantu manajemen melaksanakan tanggungjawabnya dalam mencapai kinerja secara efektif (Sawyer: 2003). Untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang sesuai dengan value for money *(economy, efficiency, effective)*, perlu peningkatan fungsi aparat pemeriksaan fungsional pemerintah dilingkungan pemerintah daerah (Mardiasmo: 2009).

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Chabib Soleh dan Suripto (2011:4) menyatakan bahwa: "Kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negative yang diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil. Melalui informasi tersebut, selanjutnya dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas suatu kebijakan, menetapkan kegiatan/program utama, dam sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan balik sebagai bahan untuk perencanaan, penentuan tingkat keberhasilan, serta untuk memutuskan suatu tindakan yang dinilai paling rasional dan menguntungkan."

Menurut Abdul Rohman (2007) pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan desentralisasi administratif, yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai kepada tingkat hirarki yang paling rendah. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan daerah diberi wewenang dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, namun mereka memilki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan serta tanggungjawab tertentu dalam hal sifat dan hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya (Coralie,1987). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa desentralisasi pengelolaan keuangan daerah meningkatkan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah. Peran manajerial pengelolaan keuangan daerah memungkinkan tercapainya kinerja dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif (Rogers, 1990). Peran menunjukkan partisipasi seseorang dalam mencapai tujuan organisasi. Peran manajerial pengelolaan keuangan daerah memungkinkan tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pengelolaan keuangan daerah untuk berpartisipasi dalam menyusun anggaran, sehingga memberi rasa tanggungjawab dan mendorong kreativitas pengelolaan keuangan daerah. Individu yang terlibat dan diberi tanggungjawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi akan semakin tinggi (Hansen & Mowen, 2006).

Abdul Rohman (2007) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja *(performance accountability).* Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja (Jabra, 1989). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja, terdapat keterkaitan Antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan. Keterkaitan tersebut dapat memudahkan perencanaan yang bersifat menyeluruh, baik dari segi pencapaian sasaran, perumusan dan implementasi program, kegiatan, maupun proses penetapan dan pengendalian anggaran serta analisis kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

(1) Pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Survei pada Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung).

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Survei pada Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung).

III. Metodologi

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif. Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa: "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas." Tujuan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Mashuri (2008:45) menyatakan bahwa: "Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan."

Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variable X_1 (Pengawasan Intern) X_2 (Pengelolaan Keuangan Daerah) terhadap Y (Kinerja Pemerintah Daerah). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan informasi berupa gambaran umum instansi, aktivitas serta dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Unit Analisis pada penelitian ini adalah 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung . *Time horizon* yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *cross section*.

Menurut Husein Umar (2011:43), "*Cross section* atau sering disebut data satu waktu adalah sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu saja".

IV. Hasil Penelitian & Pembahasan

Total skor tanggapan responden untuk variabel Pengawasan Intern diperoleh sebesar 1.453 (81%). Presentase yang diperoleh variabel pengendalian internal adalah sebesar 81% berada pada rentang interval antara 68.01% – 84.00% termasuk dalam ketegori baik, maka dapat dikatakan bahwa Pengawasan Intern pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung adalah baik. Pengawasan Intern sudah optimal, namun masih terdapat selisih sebesar 19% yang menunjukan bahwa masih terdapat masalah dalam pengawasan intern sehingga kinerja pemerintah daerah kurang optimal. Terutama dalam informasi dan komunikasi.

Total skor tanggapan responden untuk variabel Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh sebesar 925 (72%). Presentase yang diperoleh variabel pengendalian internal adalah sebesar 72% berada pada rentang interval antara 68.01% – 84.00% termasuk dalam ketegori baik, maka dapat dikatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung adalah baik. Pengelolaan Keuangan Daerah sudah optimal, namun masih terdapat selisih sebesar 28% yang menunjukan bahwa masih terdapat masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga kinerja pemerintah daerah kurang optimal terutama pada akuntabilitas masih terlihat rendah dibandingkan indikator-indikator lainnya.

Total skor tanggapan responden untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah diperoleh sebesar 359 (70%). Presentase yang diperoleh variabel Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 70% berada pada rentang interval antara 68.01% – 84.00% termasuk dalam ketegori baik, maka dapat dikatakan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung adalah baik. Kinerja Pemerintah Daerah sudah optimal, namun

masih terdapat selisih sebesar 30% yang menunjukan bahwa masih terdapat masalah dalam Kinerja Pemerintah Daerah sehingga kinerja pemerintah daerah kurang optimal.

Untuk pengujian secara parsial antara Pengawasan Intern dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan kriteria H_0 diterima jika $-t_{(\alpha/2 : n-k-1)} \leq t \leq t_{(\alpha/2 : n-k-1)}$ atau signifikansi > 0,05 dan H_0 ditolak jika $-t_{(\alpha/2 : n-k-1)} \geq t \geq t_{(\alpha/2 : n-k-1)}$ atau signifikansi < 0,05. Berdasarkan analisis memakai alat bantu SPSS versi 20 diperoleh nilai t_{hitung} 2,358 kemudian t_{hitung} ini dibandingkan dengan $t_{tabel,}$ diperoleh t_{tabel} 2,145. Sehingga t_{hitung} (2,358) > t_{tabel} (2,145) dan diperoleh signifikansi sebesar 0,033. Hasil tersebut memiliki makna bahwa hipotesis H_0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan diterimanya hipotesis alternatif menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% Pengawasan Intern (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

Untuk pengujian secara parsial antara Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan kriteria H_0 diterima jika $-t_{(\alpha/2 : n-k-1)} \leq t \leq t_{(\alpha/2 : n-k-1)}$ atau signifikansi > 0,05 dan H_0 ditolak jika $-t_{(\alpha/2 : n-k-1)} \geq t \geq t_{(\alpha/2 : n-k-1)}$ atau signifikansi < 0,05. Berdasarkan analisis memakai alat bantu SPSS versi 20 diperoleh nilai t_{hitung} 2,232 kemudian t_{hitung} ini dibandingkan dengan $t_{tabel,}$ diperoleh t_{tabel} 2,145. Sehingga t_{hitung} (2,232) > t_{tabel} (2,145) dan diperoleh signifikansi sebesar 0,042. Hasil tersebut memiliki makna bahwa hipotesis H_0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan diterimanya hipotesis alternatif menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini berarti pencappaian Kinerja Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan dengan baik.

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasakan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan berkaitan dengan pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan Intern pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung sudah baik, namun masih terdapat masalah dalam pengawasan intern sehingga kinerja pemerintah daerah kurang optimal yaitu masih adanya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung .
- Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung sudah baik, namun masih terdapat masalah dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga kinerja pemerintah daerah kurang optimal yaitu daerah yaitu masih tidak patuhnya terhadap ketentuan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan administrasi pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung.

Saran

(1) Bagi Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung
    - Lebih meningkatkan pengawasan Intern pada setiap Dinas SKPD di Pemerintahan Kota Bandung. Terutama pada indikator Informasi dan Komunikasi agar penyelenggaraan komunikasi atas informasi dapat dilakukan secara efektif.

- Lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pada setiap Dinas SKPD di Pemerintahan Kota Bandung. Terutama pada indikator akuntabilitas perlu ditingkatkan. Hasil kinerja yang akan dicapai harus ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD. agar pengeluaran daerah dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Bagi Peneliti Selanjutnya
Disarankan pada peneliti selanjutnya apabila akan melakukan penelitian yang sama, diharapkan bisa menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

REFERENSI

Abdul, Rohman. 2007. *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Maksi Vol7 No.2 ISSN: 1412-6680

Abdul, Rohman 2009, *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Di Jawa Tengah).* Jurnal Akuntansi & Bisnis Vol.9 No.1 ISSN 1412-0852

Andi Supangat. 2007. *Statistika.* Kencana Perdana Media Group: Jakarta

Askam Tuasikal. 2008. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah*. Vol.10. No 1. ISSN : 1410-8623

Arens, A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley 2003. *Auditing and Assurance Service and Integrated Approach*. 9th Edition. New Jersey. Prentice Hall International Inc.

Boyntonn, William C, Johnson, Raymond N., and Kelly, Walter G, 2001. *Modern Auditing*. 7th Edition. New York. John Wiley and Sons Inc.

Chabib soleh dan Heru Rohmansyah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.* Fokus Media: Bandung

Chabib Soleh dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Fokus Media: Bandung

Ihyaul Ulum.2009. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengatar*. Bumi Aksara: Jakarta

Indeks Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I Tahun 2013

Indra Bastian,. Gatot Soepriyanto., 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah. Salemba Empat: Jakarta

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE

Mardiasmo. 2009*. Akuntansi Sektor Publik.* Andi: Jakarta

Moh.Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. PT. GhaliaUtama: Jakarta

Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sugiyono. 2005,2007. 2010. *Metode Penelitian*. Alfabeta: Bandung

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta: Bandung

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuaitatif dan R&D.* Alfabeta: Bandung

Sugiyono, 2011, *Statistika untuk Penelitian* Cetakan Kesembilan belas*.* Alfabeta: Bandung

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Genesis : Bekasi

Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Wawan Sukmana & Lia Anggarsari. *2009. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya) Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 4, No. 1,* No.1.ISSN:1907-9958